P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

PERAN BELANJA DAERAH SEBAGAI KATALISATOR DAYA SAING DAERAH

Nur Aisyah Kustiani[1)], Miftahul Hadi[2)] , Muhammad Luthfi Mahrus[3)]
[1-2]Prodi DIII Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN
[3]Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
email: nur.aisyah@pknstan.ac.id[1], miftahulhadi@pknstan.ac.id[2], mluthfimahrus@pknstan.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja daerah terhadap daya saing daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode regresi data panel, Sampel yang digunakan dalan penelitian ini adalah 503 kabupaten dan kota di Indonesia dengan periode pengamatan selama 2 tahun (2022-2023). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah daya saing daerah dan diukur dengan menggunakan indeks daya saing daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja daerah, belanja wajib (belanja fungsi Pendidikan dan Kesehatan), belanja fungsi ekonomi dan belanja fungsi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total belanja daerah dan belanja fungsi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan. Belanja wajib berpengaruh signifikan namun dengan arah hubungan yang berkebalikan dengan dugaan, yaitu berpengaruh negatif. Belanja fungsi lingkungan hidup berpengaruh positif dan signifikan secara statistik. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa belanja pemerintah akan berfungsi sebagai katalisator daya saing daerah, namun perlu dianalisis ketepatan alokasinya. Pemerintah daerah perlu melakukan reprioritisasi alokasi anggaran pada sektor-sektor yang mendorong peningkatan daya saing daerah. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas belanja yang bersifat wajib (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) dan penguatan kapasitas institusionaluntuk menghindari pengeluaran anggaran dengan nominal tinggi namun tidak me nghasilkan peningkatan daya saing. Selain itu belanja pemerintah memerlukan waktu cukup lama untuk memberikan dampak pada daya saing daerah.

Kata Kunci: *Daya saing daerah, akuntansi, pemerintah, belanja, lingkungan*

Abstract

This study aims to examine the effect of regional spending on regional competitiveness. The study was conducted using a quantitative approach with panel data regression. The sample used in this study consisted of 503 regencies and cities in Indonesia with an observation period of two years (2022-2023). The dependent variable in this study was regional competitiveness, which was measured using the regional competitiveness index. The independent variables in this study are regional spending, mandatory spending (spending on education and health), economic spending, and environmental spending. The results show that total regional spending and economic spending have no significant effect. Mandatory spending has a significant effect but with a relationship that is opposite to what was expected. Environmental function spending has a positive and statistically significant effect. The results of this study indicate that government spending will serve as a catalyst for regional competitiveness, but the accuracy of its allocation needs to be analyzed. Local governments need to reprioritize budget allocations in sectors that encourage regional competitiveness. In addition, efforts need to be made to increase the effectiveness of mandatory spending (education, health, and infrastructure) and strengthen institutional capacity to avoid high budget expenditures that do not result in increased regional competitiveness. Furthermore, government spending requires a long time to have an impact on regional competitiveness.

Keywords: *regional competitiveness, accounting, government, spending, environment*

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia memasuki usia 25 tahun pada tahun 2024. Dengan otonomi daerah, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerahnya masing-masing. Pembangunan daerah diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah dengan penyelarasan prioritas pembangunan nasional.

Pembangunan daerah merupakan tanggung jawab kolektif pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, lembaga masyarakat, dan entitas bisnis, namun pemerintah kabupaten/kota memiliki peran sentral karena pembangunan daerah direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggung-jawabkan oleh pemerintah daerah.

Meskipun daerah diberikan kewenangan dalam membangun daerahnya, ketimpangan masih menjadi tantangan nasional, bahkan terdapat variabilitas yang cukup besar antar daerah. Ketimpangan ekonomi masih terjadi. Pada tahun 2024, ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia sebesar yang diukur dengan rasio gini sebesar 0,381. Di wilayah perkotaan rasio gini lebih tinggi sebesar 0,402 dibanding dengan rasio gini di perdesaan sebesar 0,308. Pada sisi pertumbuhan ekonomi, masih terdapat ketimpangan antar pulau. Pulau Jawa menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar bagi Indonesia yaitu 57,02% dengan tingkat pertumbuhan 4,92%, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah adalah wilayah pulau Sumatra degan tingkat pertumbuhan ekonomi 4,45% (BPS,2025).

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup merupakan salah satu tujuan strategis dari negara dan daerah dalam jangka panjang. Pemerintah memilih strategi dan mengalokasikan sumber daya yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi-strategi ini diformalkan dalam rencana pembangunan daerah yang merupakan pembangunan yang multidimensi, tidak hanya mengupayakan keberhasilan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, namun juga mengupayakan penyelesaian masalah sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia tanpa mengorbankan kepentingan generasi berikutnya, atau mempertimbangkan keadilan antar generasi (*intergenerational equity*). Oleh karena itu dalam mengukur keberhasilan pembangunan diperlukan ukuran yang komprehensif, tidak hanya menggunakan satu ukuran yang menunjukkan dimensi tertentu saja. Pengukuran keberhasilan pembangunan pada penelitian kebanyakan menggunakan Indeks pembangunan manusia (Nashshar & Mulyana, 2022; Rimawan & Aryani, 2019). Sebagian penelitian menggunakan ukuran spesifik pada bidang tertentu, misalnya kinerja bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (Nasution, 2022)

Pengukuran hasil pembangunan multidimensi dapat menggunakan indeks daya saing. Di level negara, indeks daya saing global dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan nasional. Di level pemerintah daerah, indeks daya saing dapat digunakan untuk mengukur tingkat daya saing relatif suatu daerah dibanding dengan daerah lain dan kemampuan daerah untuk merealisasikan potensi dari faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mewujudkan nilai tambah untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik dan berkelanjutan dengan tetap pada persaingan baik domestik maupun internasional (Huda & Santoso, 2014).Daya saing daerah di Indonesia diukur dengan menggunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang disusun oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). IDSD merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat daya saing atau kemampuan suatu daerah dalam bersaing dalam konteks ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Indeks dihitung menggunakan 4 komponen pembentuk daya saing yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Dari 4 komponen tersebut dibagi menjadi 12 pilar yaitu institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan informatika, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis dan kapabelitas inovasi. Tujuan dari penyusunan Indeks Daya Saing Daerah adalah untuk membantu pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu daerah dalam persaingan ekonomi, serta menyusun strategi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. (BRIN, 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah. Jika keberadaan pemerintah daerah

ditujukan untuk meningkatkan daya saing daerah, semestinya alokasi sumber daya pemerintah daerah diarahkan untuk program-program yang dapat meningkatkan daya saing. Penelitian mengenai pengaruh alokasi anggaran pemerintah daerah terhadap daya saing daerah belum banyak dilakukan. Penelitian Nurjanah et al. (2022b) menganalisis determinan daya saing pemerintah kabupaten/kota di Jambi dan menguji pengaruh belanja daerah, dana bagi hasil (DBH), sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), investasi dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat daya saing kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini menyimpulkan belanja daerah, DBH dan SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap tingkat daya saing daerah, sedangkan investasi dan PAD tidak berpengaruh signifikan. Sartika (2021) melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya mengenai bagaimana pemerintah kota meningkatkan daya saing daerah dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan menitik beratkan pada komponen pasar dalam indeks daya saing daerah, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan daya saing daerah dapat dilakukan dengan memperkuat peran *stakeholder* dalam setiap klaster industri dengan memberikan kemudahan izin usaha, pajak dan standardisasi faktor produksi. Selain itu diperlukan juga kualitas infrastruktur fisik serta tenaga kerja berkualitas yang dicapai dengan pendidikan formal dan informal. Hal ini berarti alokasi sumber daya pemerintah pada bidang-bidang tersebut dapat mendorong peningkatan daya saing daerah.

Selain di level kabupaten/kota, penelitian mengenai determinan daya saing daerah juga pernah dilakukan di oevel provinsi. (Ridwan et al., 2017) meneliti determinan daya saing provinsi di Indoensia dengan menguji variable Kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dan teknologi informasi. Hasilnya menyimpulkan bahwa Pendidikan, infrastruktur dan teknologi informasi adalah variable yang berpengaruh signifikan pada capaian daya saing provinsi.

Penelitian mengenai daya saing daerah juga pernah dilakukan di Polandia. . Bitner & Sierak (2017) melakukan pengujian pengaruh belanja pembangunan terhadap daya saing daerah. Daya saing daerah dalam penelitian ini diukur dengan pendapatan pajak yang akan menentukan kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Dengan menggunakan sampel sebanyak kota di Polandia, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang mendukung R&D dan inovasi berpengaruh terhadap dinamika perolehan pendapatan pajak. Penelitian ini menekankan kebutuhan pemerintah untuk memahami jenis pengeluaran yang mempengaruhi daya saing.

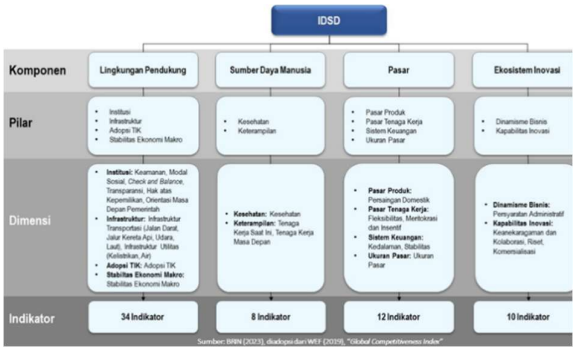
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh alokasi belanja, pendapatan daerah dan dana desa terhadap daya saing daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi pada beberapa hal. Pertama, penelitian ini mengisi kurangnya penelitian yang menguji pengaruh belanja daerah, pendapatan daerah dan dana desa terhadap pencapaian tingkat daya saing daerah. Kedua, pada variabel belanja, penelitian ini tidak hanya mengukur total belanja, namun juga menguji pengaruh belanja per fungsi yaitu belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi ekonomi, belanja fungsi kesehatan dan belanja fungsi lingkungan hidup. Hal ini penting untuk mengidentifikasi belanja fungsi apa saja yang akan memberikan kontribusi lebih pada pencapaian tingkat daya saing daerah.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Daya Saing Daerah.

Daya saing menurut *World Economic Forum* (WEF) didefinisikan sebagai kemampuan suatu entitas perekonomian (dalam hal ini pemerintah/negara) guna mencapai pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan. WEF mengukur daya saing tiap negara dengan *Global Competitive Indeks* (GCI). Sejak tahun 2018 WEF mengembangkan indikator-indikator GCI yang diklasifikasikan menjadi 4 aspek yaitu lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), modal manusia (*human capital*), pasar (*markets*) dan ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*).

Pada level daerah, masing-masing negara mengembangkan indeks daya saing sendiri. Di Indonesia, BRIN menyusun indeks daya saing daerah (IDSD) untuk level provinsi dan kabupaten/kota yang diterbitkan setiap tahun. BRIN mengadaptasi kerangka yang dikembangkan oleh WEF untuk mengembangkan IDSD sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1 Indeks Daya Saing Daerah

Kewenangan daerah untuk mengalokasikan anggaran daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah dijelaskan dalam teori desentralisasi fiskal Tiebout (1961) dan Musgrave & Musgrave (1989).Dalam literatur ini, desentralisasi secara sederhana diwujudkan dalam pelimpahan wewenang pemungutan pajak dan otorisasi pengeluaran akan menghasilkan efisiensi sektor publik yang lebih besar. Dengan memandang pemerintah sebagai agen, teorema desentralisasi menyatakan bahwa dengan adanya preferensi dan kebutuhan yang beragam, penyediaan layanan publik oleh struktur pemerintahan yang terdesentralisasi secara umum akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori desentralisasi, pemerintahan yang terdesentralisasi diasumsikan dapat memberikan keunggulan informasi dan fleksibilitas yang lebih besar dalam beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi warga negara. Fakta ini diperkuat oleh mobilitas rumah tangga karena seperti yang dinyatakan oleh Tiebout (1956), individu dapat memilih dan memilah-milah diri mereka sendiri ke dalam komunitas yang homogen di mana preferensi mereka dimaksimalkan.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dimotivasi oleh berbagai alasan. Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah besar negara kesatuan telah mengupayakan desentralisasi sebagai cara untuk mencari sektor publik yang lebih efisien dan lebih ramping. Desentralisasi fiskal berkaitan dengan bagaimana pemerintah diorganisir dan bagaimana menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Desentralisasi tata kelola pemerintahan dapat memulihkan kepercayaan dalam kebijakan publik dan memberikan dasar bagi konsensus kebijakan yang lebih luas. Sering kali ada tuntutan dari akar rumput untuk mencapai cita-cita demokrasi melalui desentralisasi. Akan tetapi, beberapa gerakan desentralisasi dirancang untuk meredam kekuatan-kekuatan sentrifugal, konflik etnis, dan/atau gerakan separatis, dan untuk meredakan sosial dan politik dengan cara memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah.

Karena desentralisasi memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur keuangannya sendiri, maka desentralisasi lebih banyak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menciptakan kebijakan keuangan daerah yang akan memberikan fleksibelitas dalam pengalokasikan sumber daya pemerintah ke dalam sektor-sektor yang akan mempercepat tujuan pemerintahannya tercapai sehingga kepentingan masyarakat
dapat terpenuhi secara berkesinambungan tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang, termasuk upaya untuk menciptakan daya saing daerah yang tinggi sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan Hipotesis

Belanja pemerintah daerah dapat dikelompokkan menurut fungsinya, yang terdiri dari 11 fungsi yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, belanja daerah merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat baik itu dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun pendapatan (Nurjanah et al., 2022b). Dari belanja yang dialokasikan pemerintah akan membuat program sesuai dengan fungsi yang ada seperti pendidikan ataupun fungsi ekonomi, dimana fungsi termasuk menjadi komponen dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), sehingga harapannya jika belanja tersebut dianggarkan dan dimanfaatkan dengan tepat maka akan meningkatkan IDSD. Penelitian sebelumnya yang menganalisis pengaruh belanja daerah pemerintah terhadap daya saing daerah dilakukan oleh Nurjanah et al. (2022b), yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap IDSD. Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Luthfi et al. (2023) yang menyatakan belanja modal tidak berpengaruh terhadap daya saing daerah.

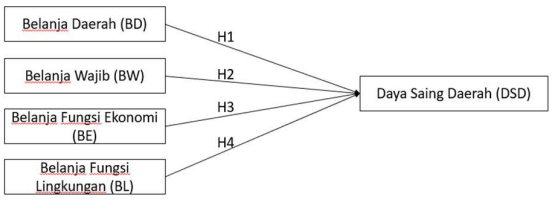
Penelitian Nurjanah et al. (2022b) menggunakan variabel belanja daerah secara umum dan penelitian Luthfi et al. (2023)

menggunakan jenis belanja modal, sedangkan penelitian ini selain menggunakan variabel belanja daerah juga ingin melihat lebih spesifik mengenai belanja pada fungsi apa saja yang memiliki pengaruh bagi peningkatan daya saing daerah. Dalam penelitian ini tidak menguji seluruh klasifikasi belanja menurut fungsi secara keseluruhan namun mengidentifikasi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan indikator-indikator dalam indeks daya saing daerah, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi yang menjadi komponen dalam IDSD. Belanja pendidikan dan kesehatan yang besarannya bersifat mandatory/wajib (20% untuk belanja pendidikan dan 10% untuk belanja kesehatan) digabungkan menjadi variabel belanja mandatory.

Belanja fungsi perlindungan lingkungan semakin diperlukan dalam program-program pengelolaan lingkungan yang pada saat ini menjadi isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanajutan, sehingga dalam penelitian ini juga dimasukkan sebagai salah satu determinan yang penting untuk diuji. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka hipotesis yang diusulkan yaitu:

H1 : Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap daya saing daerah
H2 : Belanja wajib (pendidkan dan Kesehatan) berpengaruh positif terhadap daya saing daerah
H3 : Belanja fungsi ekonomi berpengaruh positif terhadap daya saing daerah
H4 : Belanja fungsi lingkungan hidup berpengaruh positif terhadap daya saing daerah

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan kerangka model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang menguji pengaruh antar variabel berdasarkan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya (Sekaran & Bougie, 2016). Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (BD), Belanja Wajib (BW), Belanja Fungsi Ekonomi (BE), dan Belanja Fungsi Lingkungan (BL) sebagai variabel independen, serta Daya Saing Daerah (DSD) sebagai variabel dependen.

Variabel daya saing daerah didefinisikan sebagai kemampuan daerah guna menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kinerja perekonomian daerah menuju perwujudan kesejahteraan Masyarakat (Komite Pertimbangan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2022). Ukuran yang digunakan untuk mengukur daya saing daerah adalah indeks dya saing daerah yang diukur oleh BRIN. Menurut BRIN (2023) Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada Tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan Tingkat produktivitas daerah.

Variabel Belanja Daerah didefinisikan sesuai dengan definisi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Variabel ini diukur dengan total belanja daerah.

Belanja wajib didefinisikan sebagai belanja yang secara mandatory harus dipenuhi oleh daerah yaitu belanja fungsi Pendidikan dan belanja fungsi kesehatan. Belanja fungsi pendidikan wajib terpenuhi sebesar 20% menurut UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU no 20 Tahun 20023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan belanja kesehatan dialokasikan 10% dari APBD menurut UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Belanja wajib diukur dengan jumlah belanja fungsi pendidikan ditambah dengan belanja fungsi kesehatan.

Belanja Fungsi ekonomi merupakan belanja daerah yang digunakan dalam rangka menjalankan fungsi ekonomi yang ada di daerah. Belanja ekonomi diukur dengan jumlah belanja fungsi ekonomi.

Belanja lingkungan merupakan belanja daerah yang digunakan dalam rangka menjalankan fungsi lingkungan hidup yang diukur dengan jumlah belanja fungsi lingkungan hidup.

Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemeritah kabupaten/kota yang memiliki tugas

dan kewenangan dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Populasi pemerintah kabupaten dan kota pada tahun 2022 berjumlah 514. Untuk analisis model penelitian data yang digunakan adalah data keuangan daerah dari tahun 2021 dan 2022 untuk melihat pengaruhnya pada daya saing daerah tahun 2022 dan 2023. Hal ini dikarenakan belanja daerah memerlukan waktu untuk memberikan dampak pada daya saing daerah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh (menggunakan seluruh populasi), namun karena ketidaklengakapan data dan terjadinya pemekaran daerah maka sampel berjumlah 503 kabupaten dan kota atau terdapat 1006 observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data IDSD tahun 2022 dan 2023 yang diunduh dari website BRIN dan data realisasi APBD 2021 dan 2022 yang diunduh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Data belanja daerah memiliki variasi yang besar, oleh karena itu seluruh data variabel belanja dibagi dengan jumlah penduduk. Penelitian menggunakan data panel dan dilakukan analisis statistic deskriptif serta regresi data panel untuk menguji hipotesis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	DSD	BD	BW	BE	B
Mean	2.939	8727727.00	3758261.00	1197693.00	27
Median	2.920	4332172.00	1678182.00	566088.80	9
Maximum	4.160	109000000.00	49300483.00	41774210.00	1113
Minimum	0.000	209742.30	78354.00	4216.30	
Std. Dev.	0.481	13238698.00	6079555.00	2212998.00	63
Skewness	-0.820	3.81	3.83	8.29	
Kurtosis	8.252	21.45	21.06	123.12	

Pada tahun pengamatan, IDSD tertinggi diperoleh oleh Kota Semarang tahun 2022. Secara umum skor IDSD tidak memiliki variasi yang besar antar daerah. Belanja daerah per kapita tertinggi adalah Kabupaten Tambraw tahun 2022 dan terendah adalah Kabupaten Bogor tahun 2023. Data menunjukkan tidak terdapat variasi yang besar pada total belanja daerah, namun terdapat ketimpangan jika dilihat dari belanja wajib, belanja ekonomi dan belanja lingkungan hidup antar daerah kaupaten kota di Indonesia.

Dalam metode estimasi regresi data panel dilakukan analisis model terbaik diantara pilihan model yang ada yaitu Common Effect Model (FEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (RAM). Pemilihan model estimasi dilakukan dengan uji chow, uji hausman dan iji langrange multiplier dengan hasil sebagaimana Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.227531	-502,499	0.00
Cross-section Chi-square	2125.43	502	0.00

Dari hasil uji chow diketahui p value <0,05 sehingga menurut uji chow model yang digunakan adalah FEM.

Selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk membandingkan model FEM dan REM dengan hasil sebagaimana Tabel 3

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	3.658738	4	0.4542	
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.039513	0.01686	180.2785	0.0000
BD	-3.13E-08	3.67E-09	-8.5278	0.0000
BW	-6.99E-09	1.09E-08	-0.64429	0.5195
BE	-1.15E-09	2.87E-08	-0.04015	0.9680
BL	5.05E-09	2.34E-09	2.156342	0.0313
R-squared	0.123349	Mean dependent va	2.939175	
Adjusted R-squared	0.119846	S.D. dependent var	0.480683	
S.E. of regression	0.45096	Akaike info criterio	1.250083	
Sum squared resid	203.5687	Schwarz criterion	1.274506	
Log likelihood	-623.7919	Hannan-Quinn crite	1.259363	
F-statistic	35.21147	Durbin-Watson stat	0.472121	
Prob(F-statistic)	0			

Dari hasil uji Hausman diketahui bahwa p value >0,05 sehingga disimpulkan model yang lebih baik dalam penelitian ini adalah REM. Karena terjadi inkonsistensi hasil uji Chow dan uji Hausman, maka dilakukan uji Langrange Multiplier (LM). Hasil Uji LM tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Uji LM

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	289.9818	259.8415	549.8233
	0.000	0.000	0.000
Honda	17.02885	16.1196	23.4395
	0.000	0.000	0.000
King-Wu	17.02885	16.1196	16.86285
	0.0000	0.0000	0.0000
Standardized H	17.1079	35.88142	9.611818
	0.000	0.000	0.000
Standardized Ki	17.1079	35.88142	33.18453
	0.000	0.000	0.000

Hasil uji LM menguatkan hasil uji Hausman, bahwa model yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini adalah model REM, sehingga dilakukan regresi dengan model REM untuk menguji hipotesis. Karena model yang terpilih adalah model REM, maka tidak dilakukan uji asumsi klasik karena model REM diasumsikan mampu mengatas masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam uji asumsi klasik.

Hasil regresi dengan model REM disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Pengujian Persamaan Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.038882	0.02257	134.6433	0.00
BD	3.35E-09	5.24E-09	0.63865	0.5232
BW	-3.44E-08	8.35E-09	-4.1233	0.000
BE	-7.92E-09	1.10E-08	-0.71774	0.4731
BL	3.69E-08	2.10E-08	1.755533	0.0795
R-squared	0.089268	Mean dependent va		1.090829
Adjusted R-squared	0.085628	S.D. dependent var		0.232731
S.E. of regression	0.222543	Sum squared resid		49.5751
F-statistic	24.52888	Durbin-Watson stat		1.993644
Prob(F-statistic)	0.0000000			

Berdasarkan hasil uji regresi yang disajikan dalam Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Daerah dan Belanja Fungsi Ekonomi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Belanja Wajib dan Belanja Lingkungan berpengaruh signifikan. Meskipun Belanja Wajib berpengaruh signifikan namun justru memiliki pengaruh negatif jika dilihat dari koefisiennya sebesar -3,44. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1, H2, dan H3 yang diajukan dalam penelitian ini tidak didukung, sedangkan H4 yang menyatakan bahwa Belanja Fungsi Lingkungan berpengaruh positif terhadap Daya Saing Derah terbukti secara empiris.

Hasil pengujian *goodness of fit* model penelitian menunjukkan spesifikasi model tepat dengan prob F Stat <0,05, walaupun koefisien determinasinya (R^2) kecil, kurang dari 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel belanja daerah menjelaskan sebagian kecil saja dari variasi daya saing daerah. Nilai koefisien determinasi yang kecil hal yang wajar dalam penelitian ekonomi karena determinan daya saing daerah sangat kompleks dan multidimensi, dapat meliputi faktor potensi alam, demografi, potensi ekonomi dan variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. Selain itu kemungkinan dapat disebabkan variabilitas yang besar pada variabel Belanja Wajib, Belanja Ekonomi dan Belanja Lingkungan.

Hasil penelitian yang tidak dapat membuktikan pengaruh Belanja Daerah tidak mendukung hasil penelitian Nurjanah et al. (2022a) yang membuktikan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Daya Saing Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah akan memberikan dampak bukan hanya dari sisi kuantitas (jumlah belanja) namun juga ketepatan alokasi belanjanya. Total belanja daerah tidak mencerminkan efisiensi dengan kata lain jika dalam belanja daerah terjadi inefisiensi dan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran atau tidak memenuhi aspek tata kelola yang baik akan mengurangi dampaknya terhadap pencapaian tingkat daya saing daerah.

Hasil ini juga menegaskan bahwa alokasi belanja yang bersifat "katalis" tidak semata-mata bergantung pada besarnya total anggaran, melainkan pada **kualitas tujuan penggunaan**. Temuan negatif pada belanja wajib sejalan dengan studi Bitner dan Sierak (2017) yang mengidentifikasi bahwa belanja publik pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat menimbulkan **efek crowding-out** bila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas institusional. Sebaliknya, belanja lingkungan hidup menunjukkan efek **multiplier positif**, mendukung temuan Kouskoura *et al.* (2024) bahwa investasi hijau meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas hidup dan daya tarik investas

Total belanja daerah merupakan agregasi dari jenis belanja yang sangat beragam, ada komponen yang langsung berkontribusi terhadap peningkatan daya saing seperti belanja untuk infrastruktur, namun ada juga belanja yang sifatnya administrastif.

Selain faktor karakteristik belanja, daya saing dipengaruhi oleh variabel multidimensi. Pengaruh variabel non belanja seperti kualitas SDM, iklim investasi, regulasi dan kondisi ekonomi makro yang tidak sepenuhnya dapat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Penelitian (Kouskoura et al., 2024) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi daya saing daerah adalah faktor ekonomi, lapangan kerja, kemiskinan dan inklusi sosial, kesehatan, infrastruktu pendidikan, lingkungan, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri teknologi tinggi dan inovasi.

Belanja wajib yang memiliki proporsi yang cukup besar (sekitar 30%) dari APBD, dalam penelitian ini berpengaruh signifikan namun justru memiliki koefisien negatif. Artinya semakin besar jumlah belanja wajib justru mengakibatkan turunnya daya saing. Hasil ini senada dengan hasil penelitian (Ridwan et al., 2017) yang tidak dapat membuktikan tingkat kesehatan berpengaruh signifikan pada daya saing, namun berbeda pada variabel pendidikan. Pada penelitian Ridwan (2017) tingkat pendidikan tenaga kerja mempengaruhi daya saing daerah. Hal ini dapat disebabkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam fungsi pendidikan terbatas pada pendidikan dasar. Selain itu kinerja pendidikan dapat mempengaruhi daya saing daerah memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga jika diteliti dengan lag 1 tahun, hasil belanja pendidikan belum dapat dilihat pengaruhnya pada daya saing daerah.

Belanja fungsi ekonomi juga tidak memiliki pengaruh signifikan. Ketepatan sasaran dan kualitas belanja pemerintah menjadi faktor penting dibanding dengan kuantitas belanja. Belanja bidang ekonomi perlu dilakukan *refocusing* untuk meningkatkan dampaknya pada daya saing daerah, terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan dan tingkat pengangguran sebagaimana hasil penelitian Kouskoura et al. (2024). Belanja fungsi ekonomi dalam hal pelatihan tenaga kerja dan fasilitasi usaha oleh pemerintah daerah memerlukan waktu cukup lama untuk memberikan dampak. Selain itu faktor eksternal di luar kendali pemerintah seperti kondisi pasar nasional dan global juga mempengaruhi hasil belanja fungsi ekonomi pemerintah daerah.

Belanja fungsi Lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap daya saing daerah. (Kouskoura et al., 2024) menemukan bahwa salah satu penentu daya saing daerah adalah faktor lingkungan. Daerah yang peduli dengan lingkungan akan cenderung lebih kompetitif dalam hal pariwisata, investasi dan kualitas hidup penduduknya. Investasi pemerintah daerah pada kebersihan, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam dan hal-hal terkait lingkungan secara langsung mempengaruhi kenyamanan lingkungan dan menarik bagi investor, sehingga berkontribusi terhadap daya saing daerah.

5. SIMPULAN

Pemerintah daerah akan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk meingkatkan daya saing daerah sebagaimana tujuan pemerintah daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Alokasi belanja daerah diduga mampu meningkatkan daya saing daerah jika dialokasikan secara tepat sesuai dengan prioritas tujuan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total belanja daerah, belanja wajib dan belanja ekonomi tidak memberikan dampak yang diharapakan. Hanya belanja di bidang lingkungan hidup yang memiliki pengaruh signifikan dari hasil uji regresi pada penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja pemerintah perlu dievaluasi dalam hal ketepatan sasaran belanjanya, efektivitasnya dan efisiensinya sehingga dapat mempengaruhi kinerja daerah.

Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari evaluasi bagi pemerintah daerah dalam hal:

1. **Re-prioritisasi alokasi**: Pemerintah daerah sebaiknya menambah proporsi belanja fungsi lingkungan hidup, misalnya dengan memperbesar alokasi untuk program pengelolaan sampah, penanaman kembali hutan, dan energi terbarukan.
2. **Evaluasi mekanisme belanja wajib**: Diperlukan **audit kinerja** yang lebih ketat pada program pendidikan dan kesehatan, serta integrasi dengan indikator output kualitas (mis. rasio guru-murid, cakupan layanan kesehatan) untuk menghindari pengeluaran nominal tinggi yang tidak menghasilkan peningkatan kompetensi manusia.
3. **Penguatan kapasitas institusional**: Mengingat dampak belanja memerlukan **waktu lag** (lihat paragraf

"belanja pemerintah memerlukan waktu cukup lama"), diperlukan sistem monitoring jangka menengah (3-5 tahun) yang memantau efek spillover antar-sektor.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya dalam hal:

- Data yang digunakan bersifat **aggregat per kapita**, sehingga variasi internal tidak dapat terdeteksi.
- Analisis tidak memperhitungkan **variabel eksternal** seperti kebijakan nasional yang berubah selama 2022-2023 (mis. kebijakan pajak karbon).
- Model panel linear mengasumsikan **homogenitas efek** antar wilayah, padahal karakteristik geografis dan sosial-ekonomi dapat memodifikasi hubungan belanja-daya saing

Penelitian selanjutnya perlu menambahkan periode pengamatan lebih panjang agar mendapatkan hasil yang lebih tepat. Variabel lain selain belanja daerah dapat ditambahkan misalnya faktor sosio demografi, ekonomi dan sumber daya alam yang kemungkinan dapat mempengaruhi daya saing daerah. Selain itu, Penelitian lanjutan dapat mengaplikasikan **model efek tidak tetap (fixed-effects) dengan interaksi** antara jenis belanja dan indeks kemiskinan, atau menggunakan **analisis jalur struktural (SEM)** untuk mengurai mekanisme mediasi antara belanja lingkungan, inovasi teknologi, dan daya saing. Selain itu, memperluas cakupan waktu (mis. 2018-2023) akan memungkinkan analisis dinamika jangka panjang serta pengujian **efek lag** yang lebih akurat

6. DAFTAR PUSTAKA

Bitner, M., & Sierak, J. (2017). *The Impact of Developmental Exependiture on the Competitiveness of Local Governments*. Institute of Economic Research Working Papers.

Huda, M., & Santoso, E. B. (2014). Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur berdasarkan Potensi Daerahnya. *Jurnal Teknik ITS*, *3*(2), C81–C86.

Komite Pertimbangan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2022). Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (Kajian Pemeringkatan Kabupaten di Indonesia 2022). *Kppod*, 1–320.

Kouskoura, A., Kalliontzi, E., Skalkos, D., & Bakouros, I. (2024). Assessing the Key Factors Measuring Regional Competitiveness. *Sustainability (Switzerland)* , *16*(6), 1–23. https://doi.org/10.3390/su16062574

Luthfi, M., Albetris, A., Rahayu, R., & Sumantri, S. (2023). Kinerja Keuangan dan Kinerja Non Keuangan terhadap Daya Saing Daerah Kabupaten Bungo. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, *8*(1), 1226–1234.

Musgrave, Richard. A., & Musgrave, P. B. (1989). *PUBLIC FINANCE IN THEORY AND PRACTICE* (5th ed.). McGraw Hill.

Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *7*(3), 255–270.

Nasution, M. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, *4*(2), 141–158. https://doi.org/10.22212/jbudget.v4i2.80

Nurjanah, R., Silitonga, R. A., & Mustika, C. (2022a). Analisis determinan daya saing daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *17*(3), 581–590.

Nurjanah, R., Silitonga, R. A., & Mustika, C. (2022b). Analisis determinan daya saing daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *17*(3), 581–590.

Ridwan, Hasanudin, B., Amri, M., & Madris. (2017). The Determinants of Regional Competitiveness. *Scientific Research Journal*, *Volume V*(XII), 48. https://doi.org/10.5465/ambpp.2015.13549 symposium

Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *9*(3), 287–295.

Sartika, I. (2021). Determinan Daya Tarik Investasi di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, *13*(1), 76–95.

Tiebout, C. M. (1961). *An Economic Theory of Fiscal Decentralization: Vol. Publisher*. Princeton University Press.